

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA TAHUN
2012-2018**

Richa Dwi Cahyani
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
richadwicahyani@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to analyze the influence of HDI (Human Development Index), Open Unemployment, FDI (Foreign Direct Investment) and the degree of fiscal decentralization on income inequality in Java Island period 2012-2018. The data used in this research were secondary data were of 6 provinces in Java Island in the periode 2012-2018. The model used in this research was multiple linear regression analysis using panel data and using fixed effects model. Based on the results of the research that the variable HDI, Open unemployment, and the degree of decentralization have positive and significant effect to income inequality in Java Island and FDI have a negative and not significant effect to income inequality in Java Island periode 2012-2018.

Keywords: *Income Inequality, Gini Ratio*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia), TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), PMA (Penanaman Modal Asing), dan derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari 6 provinsi di Pulau Jawa dengan periode tahun 2012-2018. Model regresi yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel dan menggunakan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM, TPT, dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa dan PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Indeks Gini

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang melainkan negara maju sekalipun tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya suatu ketimpangan yang terjadi, serta solusi dari tingkat kesulitan yang dialami. Keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dibagi menjadi dua gambaran yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif yang dimaksud adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 40 persen penduduk yang menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan paling tinggi. Sedangkan distribusi pendapatan yang mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu (Sukirno, 2006).

Ukuran yang di pakai untuk mengetahui ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan adalah koefisien gini atau indeks gini yang berkisar antara nol sampai satu. Indeks gini sebesar nol menunjukkan kemertaaan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang hampir sama besarnya. Sedangkan indeks gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna (Hudiyanto, 2017).

Pulau Jawa merupakan wilayah pusat kegiatan di Indonesia, baik bagi pusat kegiatan perekonomian maupun pemerintahan, seharusnya dengan kondisi tersebut bisa menekan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat kepada kondisi ketimpangan yang rendah dibandingkan dengan pulau lainnya seperti pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara, tetapi kondisi ini belum bisa membuat pulau Jawa menekan ketimpangannya dibandingkan dengan pulau lainnya, hal ini dapat dilihat dari angka ukuran ketimpangan pendapatan. Berikut adalah data perkembangan indeks gini antar pulau di Indonesia:

TABEL 1.1.
Rata-Rata Nilai Indeks Gini Antar Pulau di Indonesia Tahun 2012-2018

Tahun	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali	Papua
2012	0.404	0.367	0.363	0.397	0.369	0.385
2013	0.394	0.352	0.366	0.404	0.377	0.381
2014	0.414	0.35	0.363	0.399	0.396	0.379
2015	0.406	0.336	0.318	0.38	0.369	0.361
2016	0.395	0.337	0.332	0.382	0.367	0.363
2017	0.4	0.331	0.329	0.386	0.372	0.359
2018	0.4	0.325	0.331	0.375	0.371	0.362

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2018 (data diolah)

Indek Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* ditahun 1990 dan dipublikasikan secara bertahap di dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. Tiga dasar yang menjadi dimensi dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran.

Sumber daya manusia merupakan suatu yang paling penting dalam sebuah pertumbuhan ekonomi. Selain itu manusia merupakan salah satu aset bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus berfokus pada manusia. Kinerja dalam perekonomian secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan manusia seperti dalam hal tingkat pendapatan, serta distribusi pendapatan dalam masyarakat. Pembangunan Manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan akan mempengaruhi kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, bahkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik akan berpengaruh lebih baik lagi.

Menurut Prawoto (2019) pengangguran merupakan masalah lain dalam perekonomian selain masalah pertumbuhan ekonomi rendah, tingkat inflasi tinggi, ketidakseimbangan neraca pembayaran dan lainnya. Hampir semua Negara mempunyai masalah dalam tingkat pengangguran yang sudah menjadi masalah lama. Negara yang mempunyai tingkat pengangguran dibawah 4% dikatakan pada keadaan keseimbangan penuh (*full employment*).

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar belum tertampung di dalam sektor ekonomi. Pengangguran terbuka ini merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (yang belum pernah bekerja sama sekali, maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan usaha, mereka yang sedang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum memulainya. Indikator dalam pengangguran terbuka yaitu dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, dengan jumlah penduduk dalam angkatan kerja.

Kehilangan pekerjaan atau sebagai pengangguran adalah masalah yang secara langsung berpengaruh pada manusia dan menjadi sebuah peristiwa ekonomi dan menjadi sebuah ukuran dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yang sulit untuk dihadapi dalam kehidupan manusia. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan akan menurunkan standar hidup masa kini dan kekhawatiran untuk masa depan, maka dengan adanya pengangguran berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang akan berkurang (Mankiw, 2018).

Investasi pada dasarnya adalah kegiatan pembangunan ekonomi yang bisa dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan pusat ataupun pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah yang tujuannya untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam sistem pelayanan publik yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab birokrasi di Indonesia (Fahmi, 2018).

Ketimpangan pendapatan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal seperti perpajakan dan subsidi, kebijakan moneter atau perbankan, dan kebijakan lainnya (Tambunan, 2018). Mekanisme hubungan keuangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah diharapkan membantu perekonomian daerah tersebut menjadi lebih baik, karena pada dasarnya yang mengetahui kebutuhan suatu daerah hanyalah daerah tersebut.

Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian dan juga pusat pemerintahan tidak menjadi jaminan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat di pulau tersebut merata antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fenomena di atas, mengenai permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.

METODE

Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa, terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten. Data pada penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam bentuk angka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder berupa data panel. Merupakan gabungan dari data *time series* dari tahun 2012-2018 (7 tahun) dan data *cross section* dari 6 provinsi di pulau Jawa. Variabel yang digunakan meliputi variabel indeks gini sebagai variabel dependen, dan yang menjadi variabel independen meliputi variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Penanaman Modal Asing dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Adapun model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{INDEKS GINI} = \alpha + b_1\text{IPM}_{it} + b_2\text{TPT}_{it} + b_3\text{LOGPMA}_{it} + b_4\text{DDF}_{it} + e$$

Keterangan:

INDEKS GINI : Ketimpangan Pendapatan 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2012-2018

IPM : Indeks Pembangunan Manusia 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2012-2018

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2012-2018

PMA	: Penanaman Modal Asing 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2012-2018
DDF	: Derajat Desentralisasi Fiskal 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2012-2018
i	: Perusahaan
t	: Waktu
e	: <i>Error term</i>

Menurut Basuki (2017) dalam estimasi regresi data panel ada beberapa metode yang bisa digunakan, umumnya ada tiga metode atau pendekatan yang dilakukan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu Metode *Common Effect*, Metode *Fixxed Effect*, Metode *Random Effect*.

Menentukan teknik atau model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel, peneliti harus melakukan pemilihan teknik estimasi diantaranya ada tiga uji yang digunakan, yakni pertama Uji *Chow* diterapkan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau *Fixxed Effect* yang paling tepat digunakan dalam data panel. Kedua, Uji *Hausman* digunakan untuk memilih antara *Fixxed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Ketiga *Langrange Multiplier (LM)* (Basuki dan Prawoto, 2016).

Dalam penelitian ini terdapat uji asumsi klasik dan uji statistik dalam mengestimasi hasil penelitian. Uji asumsi klasik dalam data panel adalah uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t, uji f dan uji R-squared. Sedangkan dalam uji pemilihan model terbaik yang digunakan dalam penelitian meliputi uji *chow* dan uji *hausman*.

HASIL DAN ANALISIS

A. Uji Kausalitas Data

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui bahwa ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Hasil menyatakan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam peneliian terbebas dari masalah multikolinearitas.

B. Uji Pemilihan Model

Menentukan teknik atau model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel harus melakukan pemilihan teknik estimasi diantaranya.

1. Uji *Chow*

Berdasarkan hasil uji chow bahwa kedua nilai *Cross Section-F* dan *Chi-square* sebesar (0.0000) artinya metode terbaik yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *Fixed Effect*.

2. Uji *Hausmant*

Hasil menunjukkan nilai probabilitas pada Cross-section random sebesar 0.0027 artinya model yang tepat digunakan dalam regresi data panel adalah model *fixed effect*.

C. Hasil Regresi Data Panel

TABEL 1.2.
Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variabel Dependen: (GINI) Ketimpangan (Y)	Fixed Effect Model
Konstanta (C)	0.015382
Standar Error	0.246714
Probabilitas	0.9507
IPM (X1)	0.005079
Standar Error	0.002818
Probabilitas	0.0809
TPT (X2)	0.015042
Standar Error	0.004571
Probabilitas	0.0024
LOGPMA (X3)	-0.007537
Standar Error	0.005124
Probabilitas	0.1510
DDF (X4)	0.001318
Standar Error	0.000567
Probabilitas	0.0265
R²	0.745494
F_{statistic}	10.41488
Probabilitas	0.000000
Durbin-Watson stat	2.733465

$\beta_1 = 0.005079$ artinya jika Indeks Pembangunan Manusia naik sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar 0.005079, dengan asumsi ketimpangan tetap.

$\beta_2 = 0.015042$ artinya jika Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 0.012042, dengan asumsi ketimpangan tetap.

$\beta_3 = -0.007537$ artinya jika Penanaman Modal asing naik sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0.007537, dengan asumsi ketimpangan tetap.

$\beta_4 = 0.001318$ artinya jika Derajat Desentralisasi Fiskal naik sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 0.001318, dengan asumsi ketimpangan tetap.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji t

1) Pengujian Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis Indeks Pembangunan Manusia memiliki t-hitung sebesar 0.005079 dan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar $0.0809 < 0.10$ yang artinya variabel indeks pembangunan manusia secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

2) Pengujian Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki t-hitung sebesar 0.015042 dan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar $0.0024 < 0.10$ yang artinya variabel tingkat pengangguran terbuka secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

3) Pengujian Variabel Penanaman Modal Asing

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing memiliki t-hitung sebesar -0.007537 dan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar $0.1510 > 0.10$ yang artinya penanaman modal asing secara individu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

4) Pengujian Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil analisis menunjukkan variabel Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki t-hitung sebesar 0.001318 dan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar $0.0265 < 0.10$ yang artinya variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

2. Uji f

Menurut Widarjono (2018) Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui jika kita mempunyai lebih dari satu variabel independen apakah berpengaruh pada variabel dependen secara keseluruhan. Berdasarkan hasil dari uji F dengan alat analisis software *E-views 7*, diperoleh nilai probabilitas F sebesar $0.000000 < 0.10$. Hasil dari uji F menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3. R-Squared

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam penelitian tersebut dalam menjelaskan himpunan variasi variabel dependen. Hasil regresi dengan metode *fixed effect model* diperoleh nilai R-squared sebesar 0.745494, artinya sebesar 74.5494% dari model yang digunakan dalam penelitian mempengaruhi variabel dependen, dan sisanya 25.4506% dipengaruhi oleh model variabel lain di luar penelitian.

E. Interpretasi

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel indeks pembangunan manusia mempunyai koefisien positif yang artinya memiliki hubungan dengan ketimpangan pendapatan yang positif, dengan besaran nilai koefisien sebesar 0.005079, dengan nilai probabilitas sebesar 0.0809. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hipotesis dan juga hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang “ketimpangan pendapatan di provinsi DIY” oleh Hartini (2017).

Teori ekonomi mengenai teori modal manusia yang dipelopori Gary Backer, Edwar Dension dan Theodore Schultz menyatakan bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi yang diukur dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan yang lebih tinggi dengan upah yang lebih besar pula dibandingkan dengan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut memungkinkan bahwa salah satu instrument dari Indeks Pembangunan Manusia yakni indeks pendidikan yang didalamnya termasuk rata-rata lama sekolah yang merupakan kunci dalam penciptaan tenaga kerja yang produktif, menurut data badan pusat statistik rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa tergolong tinggi sehingga dapat membentuk dan menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berkemampuan tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, namun hal tersebut tidak merata, hanya pada daerah dengan pusat ekonomi, terutama pada daerah pusat industri atau daerah yang berpendapatan tinggi saja, sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata dan menjadi pemicu terjadinya kesenjangan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian yang sejalan dengan penelitian Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksani pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa hasil dari variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Koefisien tingkat pengangguran terbuka dengan nilai 0.015041 menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel TPT dengan ketimpangan pendapatan, yang berarti apabila tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 1% dengan asumsi semua variabel tetap maka ketimpangan pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar 0.015042. Selain itu, nilai probabilitas yang dimiliki variabel TPT sebesar 0.0024 sehingga pengaruhnya positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rosa dan Sovita (2016).

Dengan kata lain yaitu semakin turun tingkat pengangguran terbuka dengan asumsi semakin banyak tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi, maka akan menambah pemasukan kepada masyarakat. Menurunnya TPT akan mengindikasikan semakin banyaknya penerima pendapatan di masyarakat, baik gaji maupun upah yang diterima masyarakat setiap daerahnya berbeda. Semakin menurunnya TPT atau dengan kata lain semakin banyaknya masyarakat yang bekerja dan menerima pendapatan, maka diharapkan mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan.

3. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Penanaman modal asing (PMA) menunjukkan tanda negatif dan tidak signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10%. Koefisien PMA mempunyai nilai sebesar -0.007537 dan nilai probabilitas sebesar 0.1510 yang artinya bahwa setiap peningkatan PMA sebesar 1% dengan mengasumsikan variabel lain tetap maka terjadi penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0.007537 , akan tetapi pengaruh tersebut tidak secara signifikan.

Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hipotesis, bahwa dalam hipotesis dinyatakan PMA berpengaruh negatif dan signifikan. Berbeda pula dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Macarena Suanes. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa, hal tersebut bisa dikarenakan investasi asing lebih memilih sektor tersier yang padat modal dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder yang padat karya hal tersebut sesuai dengan data yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sektor padat modal lebih mengutamakan menggunakan modal dalam jumlah besar, baik modal untuk kegiatan operasional maupun pengembangan bisnis. Selain itu, dalam padat modal juga cenderung memakai teknologi yang canggih dalam kegiatannya. Penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian sebelumnya oleh Ahmad Pauzil Dewa, dan Nyoman Budiana pada tahun 2016 yang juga menyatakan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap

ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali dikarenakan ada beberapa kabupaten pada tahun 2007-2013 yang tidak mendapatkan penanaman modal yang ditanamkan investor.

4. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Nilai koefisien derajat desentralisasi fiskal sebesar 0.001318 dan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar 0.0265, artinya derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 10% terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018. Penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, akan tetapi sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thofan (2019).

Menurut peraturan pemerintah keuangan Republik Indonesia No.81/PMK.07/2013 menyebutkan bahwa transfer dana ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

Dana perimbangan masing-masing Provinsi di Pulau Jawa yang berbeda, menjadi masalah bahwa provinsi yang justru memiliki nilai derajat desentralisasi yang tinggi atau tingkat kemandirian yang tinggi dan juga cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah di masing-masing provinsi justru mendapatkan dana perimbangan atau dana transfer ke daerah yang tinggi. Sebaliknya, yang tergolong memiliki nilai derajat desentralisasi fiskal yang rendah dan juga tergolong indeks kemiskinan yang tinggi justru memperoleh alokasi yang rendah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.
3. Hasil pengujian variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.
4. Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia yang seharusnya menjadi representasi dari kualitas manusia tidak menjamin akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di Pulau Jawa, oleh sebab itu pemerintah diharapkan melakukan gerakan yang berkesinambungan agar memacu naiknya IPM terutama pada indeks pendidikan, yang lebih berkualitas, dan diharapkan dapat menghasilkan lulusan terbaik dan sesuai tuntutan dunia kerja, agar pemerataan terjadi di Pulau Jawa sehingga pendapatan semakin merata.
2. Dari sisi tingkat pengangguran terbuka yang semakin tinggi nilainya akan terus menambah ketimpangan pendapatan, hendaknya pemerintah meningkatkan jiwa kewirausahaan serta membuat kebijakan yang mendukung tumbuhnya ekonomi kerakyatan atau sektor informal yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
3. Nilai investasi asing yang masuk mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018 namun tidak secara signifikan, dikarenakan nilai investasi yang tinggi ditanamkan di sektor padat modal. Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam penerimaan investasi asing yang masuk ke dalam negeri tertutama di Pulau Jawa, dan melakukan pemerataan lokasi bagi investasi asing yang masuk, tanpa mengurangi kerjasama yang sudah di bangun dengan baik oleh berbagai Negara.
4. Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan wewenang pemerintah pusat yang turun ke pemerintahan daerah, seharusnya hal ini bisa dimaksimalkan,

terlebih pemerintah daerah yang lebih paham terhadap kebutuhan dan kondisi daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Selain itu, anggaran pengeluaran pemerintah daerah lebih diperhatikan terlebih pada belanja modal dan belanja yang tidak memiliki nilai return seperti belanja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., Wicaksana, R.A., 2017. Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya 6.
- Basuki, A.T., 2017. Ekonometrika dan Aplikasi Dalam Ekonomi (Dilengkapi Aplikasi Eviews 7). Danisa Media, Yogyakarta.
- Basuki, A.T., Prawoto, N., 2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews). Rajawali Pers, Jakarta.
- Fahmi, I., 2018. Pengantar Perekonomian Indonesia : Teori, Konsep, dan Realita. Alfabeta, Bandung.
- Hudiyanto, H., 2017. Ekonomi Pembangunan. Lingkar Media, Yogyakarta.
- Mankiw, N.G., 2018. Pengantar Ekonomi Makro Edisi 7. Salemba Empat, Jakarta.
- Pauzi, A., Budiana, D.N., 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Pendapatan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 5, 24.
- Prawoto, N., 2019. Pengantar Ekonomi Makro. Rajawali Pers, Depok.
- Rosa, Y. del, Sovita, ingra, 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa 2, 12.
- Suanes, M., 2016a. Foreign direct investment and income inequality in Latin America: A sectoral analysis. CEPAL Review 2016, 45–61. <https://doi.org/10.18356/13c68e36-en>
- Sukirno, S., 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Prenada Media Group, Jakarta.
- Tangkilisan, H.N.S., 2005. Manajemen Publik. Grasindo, Jakarta.
- T.H Tambunan, T., 2018. Perekonomian Indonesia 1965-2018. Ghalia Indonesia, Bogor.

Thofan, M., 2019. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017) 12.

Tri Hartini, N., 2017. Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun 2011-2015 6, 10.

Widarjono, A., 2018. Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.